**KRITERIA PEMBENTUKAN UPT**

1. Melaksanakan kegiatan teknis Operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Indikator : 1. Kegiatan yang dilakukan merupakan pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan
2. Bukan merupakan kegiatan lintas SKPD
3. Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya

Tugas Pokok : ( diisi )

Penjelasan : ………………………( terkait dengan 4 indicator diatas )

2. Penyediaan barang/jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain

Indikator :

1. Barang atau jasa yang dihasilkan
2. Barang atau jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang kolektif maupun barang individu
3. Penyediaan barang atau jasa diperlukan secara terus menerus

Penjelasan : …………………. ( Terkait dengan 3 indicator di atas )

.3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator :

1. Layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintahan.
2. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA atau penyedia lainnya.

Penjelasan :……………………. ( terkait dengan 2 indikator diatas )

.4. Tersedianya sumber daya yang meliputi Pegawai, Pembiayaan, sarana dan prasarana.

Indikator :

1. Pegawai yang ditempatkan pada UPT tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain.
2. Memberdayakan pegawai yang sudah ada, bukan menunggu formasi pegawai baru baik PNS maupun Honorer
3. Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja public secara signifikan ( maksimal penambahan belanja pegawai 0,5% dari total belanja pegawai perangkat daerah ybs )
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.

Penjelasan : ……………………….( terkait dengan 4 indikator diatas)

* Sebutkan jumlah pegawai dengan nama jabatannya.
* Sebutkan Jumlah anggaran perangkat daerah dan berapa persen yang di alokasikan untuk UPTD yang bersangkutan
* Sumber pendanaan

1. Memiliki Standar Operasional Prosedur ( SOP )

* Lampirkan apapbila sudah ada SOP

1. Memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota.

( Tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan kabupaten/kota.)

Penjelasan :…………………………………

1. Tersedianya jabatan Fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan

Sebutkan jumlah jabatan fungsional dan nama jabatannya.